

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Romadhon. (2014). Strategi Konservasi Pulau Kecil Melalui Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Gili Labak, Sumenep). *Jurnal Kelautan*.
- Ahmad Usman. (2023). Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*.
- Albar, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Manajemen Strategi Dalam Organisasi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Hal 85–97.
- Amah et al (2018). Perkembangan Wilayah Perbatasan Maritim Di Indonesia: Studi Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Amalia, F., & Triadi, I. (2025). *Media Hukum Indonesia (Mhi) Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin Dan Hukum Di Lingkungan Tni*. Hal 434–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>
- Andri Irawan, Silas Tanggu Redu, Lindon R. Pane, Jeremias Tuhumena, Mukhtar Umakaapa. (2021). *Wajah Baru Beranda Pesisir Perbatasan: Potret Reflektif Pembangunan*.
- Anthoni Sugianto. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi Di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Putra, Rizky Octa Putri Charin, Khairi Rahmi (2024). Pembangunan Kawasan Perbatasan: Efektivitas Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut Di Kabupaten Bintan. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. Hal 31–45.
- Ardiansyah, R. (2024). Keterbatasan Keamanan Maritim Dan Infrastruktur Di Perbatasan Luar Indonesia. *Jurnal Keamanan Laut*.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Simbiosis Rekatama Media, Ed.; Bandung).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Laporan Kebijakan Investasi Nasional Dan Pengembangan Wilayah Perbatasan. *Bkpm Republik Indonesia*
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Bnpp). (2025)
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2023). *Rencana Strategis*

Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2020–2024.

- Bateman. (2020). Tantangan Keamanan Maritim Di Perairan Perbatasan Asia Tenggara. *Jurnal Keamanan Asia*.
- Baylis et al (2023). Strategi Di Dunia Kontemporer. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*.
- Bnpp. (2023). *Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*.
- Bnpp. (2024). *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*.
- Clausewitz (Dalam David, 2011. (T.T.). Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara
- Dahuri, R. (2018). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Terpadu*.
- Dao, Y & Kusuma. (2022). Strategic Development Of Indonesia's Outermost Islands As An Enhancement Of National Maritime Defense And Sovereignty. *Udayana Journal Of Law And Culture*.
- Deddy Theohery. (2021). Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 17–30.
- Djandika et al (2024). Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim Terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus: Illegal Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Intenasional*.
- Sianturi. D (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi Tni Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Dzakwan & Taufiq (2022). Kerentanan Pesisir Pulau Kecil (Studi Kasus: Pulau Karimunjawa Dan Kemujan). *Jurnal Perikanan Dan Penelitian Kelautan*. Hal 91–103.
- Enjoy Yone Mogonta. (2019). Pengaturan Indonesia Tentang Upaya Pengelolaan Dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar. *Lex Et Societatis*.
- Erman Rustiadi (2020). *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*.
- Fandeli (2020). Manajemen Ekosistem Pesisir Pulau-Pulau Kecil Untuk Ekowisata Berkelanjutan Di Pulau Saparua. *Jurnal Penelitian Kehutanan*.
- Fauzi (2021). *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*.

- Ferry Trisnaputra. (2023). Strategi Dalam Tata Kelola Maritim Kepulauan Terluar Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan*.
- Fiantika (2022). Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*.
- Gultom F et al (2024). Indonesia Journal Analisis Yuridis Terhadap Strategi Geopolitik Di Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Tentang Sengketa Wilayah Perbatasan. *Adil Indonesia Journal*.
- Hamidah (2023). Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer. *Jurnal Penelitian Humaniora*.
- Hamza. (2022). Kebijakan Hukum Pengelolaan Perbatasan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan..*
- Hitt et al (2024). Strategic Management: Concepts And Cases. *Urnal Administrasi Publik*.
- Susilowati (2024). Indonesia's Strategy In Maritime Defense Diplomacy To The State Fpda Members (Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, And United Kingdom) . *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*.
- Hendrawati Hamid (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bnpp Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*.
- Jarot Witono, Y. H. (2024). Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia Dan Peningkatan Kerjasama Regional Di Asean. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Jurnalintelektiva. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Ekowisata Bahari Di Kabupaten Bintan. *Jurnal Intelektiva*.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (Kkp). (2024). *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berbasis Ekonomi Biru*.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (Kkp) (2025) *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*
- Kementerian Pertahanan Ri. (2024). *Kebijakan Pertahanan Negara Di Wilayah*

Perbatasan Laut. Keppres-6-2017-Ppkt. (T.T.).

- Endah K (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*.
- Kusumastanto T. (2021). Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.
- Kusumawati (2021). Strategi Penguatan Keamanan Maritim Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Lestari, M (2024). Dampak Pelanggaran Batas Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Maritim*.
- Lestari, N. (2023). Pembangunan Berkelanjutan Pulau-Pulau Terluar Kecil: Perspektif Infrastruktur Dan Keamanan. *Jurnal Kebijakan Maritim*.
- Lumbantoruan T. (2023). Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan. *Jurnal Akuatiklestar*.
- Mahendra, A. (2023). Keterbatasan Pengawasan Maritim Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Perbatasan. *Jurnal Keamanan Laut Nusantara*.
- Moleong, L (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. Pd. Albi Anggito & Johan Setiawan, Ed.).
- Muhammad A(2024). Transformasi Kebijakan Maritim Dalam Era Digital: Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Keamanan Lautan Di Indonesia. *Jurnal Studi Internasional Dan Lokal*.
- Iswardhana A. (2021). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim 1. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Sajidin (2024). Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Nugraha A. (2024). Pemanfaatan Dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan Dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim. *Simbur Cahaya*. Hal 272–300. <https://doi.org/10.28946/Sc.V30i2.2858>

- Nugroho B. (2023). Keamanan Perbatasan Dan Tantangan Pelanggaran Batas Maritim Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Keamanan*.
- Nurhasanah (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Pulau Kecil Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kelautan*.
- Prasetyo B. (2021). Sistem Pengawasan Maritim Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*.
- Rabowo A. (2022). Tantangan Infrastruktur Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Perbatasan*.
- Redjo (2017). . Pengelolaan Pemerintah Dalam Pengaturan Pulau- Pulau Kecil Terluar Indonesia. *Jurnal Agreria*. Hal 116–232.
- Riandi E. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Rizal M. (2021). Tata Kelola Pulau Kecil Terluar Sebagai Instrumen Pertahanan Dan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Rizal, M. , & S. A. (2021). Tata Kelola Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Rustiadi (2023). *Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan Pesisir*.
- Samudra (2022). Potensi Wisata Bahari Pulau- Pulau Kecil Di Kawasan Kapoposang, Kabupaten Pangkep. *Perikanan Laut*. Hal 87–96
- Sari (2019). Pemanfaatan Data Sekunder Dalam Penelitian Sosia. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Siti M (2021). *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*.
- Satria A. (2022). *Sosiologi Masyarakat Pesisir Dan Pulau Kecil*.
- Simanjuntak M. (2024). Infrastruktur Perbatasan Dan Peningkatan Ekonomi Wilayah Terluar. *Jurnal Pembangunan Kawasan*.
- Siregar R. (2024). Kerentanan Pulau Kecil Terluar Terhadap Ancaman Pelanggaran Wilayah Laut. *Jurnal Studi Maritim*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.
- Suharyanto. (2020). Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di

Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial Dan Ekonomi. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. Hal 73–84.

Suharyanto et al (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Pendidikan Dan Sosial*. Hal 1–9.

Sutrisno & Utomo. (2025). Manajemen Strategis Komando Daerah Militer Iii Tni Al Satuan Kapal Patroli Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.

Syafrizal. (2023). *Ekonomi Regional: Teori*.

Tambunan H. (2021). Tantangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Todaro M (2020). Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Umar, H. (2008). *Manajemen Strategis Dalam Aksi*.

Wahyuni (2022). Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Hal 115–128.

Wardana, A. (2023). Pendekatan Deskriptif Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.

Lafaila (2023). Pendekatan Kontekstual Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial*.

Willem (2025). Tata Kelola Perbatasan Yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor Untuk Pembangunan Dan Keamanan Di Merauke. *Ilmu Sosial*. Hal 412–424.

Kusuma (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Hal 447–458.

Yusnaldi. (2022). Strategi Pertahanan Dalam Menjaga Keamanan Maritim Di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Politik Dan Internasional*.

Adellia, (2024). Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 76–98.

Ahmad. (2020). *Manajemen Strategik dalam Pendidikan*.

Usman. (2023). Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*,.

- Albar M. (2021). Konsep dan Implementasi Manajemen Strategi dalam Organisasi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2, 85–97.
- Amalia & Triadi (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI*. 3(3), 434–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>
- BNPP. (2023). *Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*.
- Alfredo et al (2024). Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus: Illegal Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4.
- Sianturi. (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi Tni Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.
- Eva (2023). Analisa Pesta Penting Batam Dan Bintan Sebagai Entry Point Border Tourism dengan Singapura. *Jurnal Mata Pariwisata*, 2, 10-14.
- Trisnaputra. (2023). Strategi Dalam Tata Kelola Maritim Kepulauan Terluar Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan*.
- Gultom et al (2024). Indonesia Journal Analisis Yuridis Terhadap Strategi Geopolitik Di Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Tentang Sengketa Wilayah Perbatasan. *Adil Indonesia Journal*, 5(2)
- Hitt (2024). Strategic Management: Concepts And Cases. *Urnal Administrasi Publik*.
- Jarot (2024). Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia Dan Peningkatan Kerjasama Regional Di Asean. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.
- Kusumastanto T. (2021). Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2.
- Kusumawati (2021). Strategi Penguatan Keamanan Maritim Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11.
- Muhammad (2024). Transformasi Kebijakan Maritim Dalam Era Digital: Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Keamanan Lautan Di Indonesia. *Jurnal Studi Internasional Dan Lokal*, 8.
- Nugraha A (2024). Pemanfaatan Dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan Dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim. *Simbur Cahaya*, 272–300. <https://doi.org/10.28946/Sc.V30i2.2858>
- Prasetyo B (2021). Sistem Pengawasan Maritim Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 11.

Sari D (2021). *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*. 8.

Suharyanto et al (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Pendidikan Dan Sosial*, 9, 1–9.

Sutrisno (2025). Manajemen Strategis Komando Daerah Militer Iii Tni Al Satuan Kapal Patroli Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4.

Umar, H. (2008). *Manajemen Strategis Dalam Aksi*. 2.

Winanda (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, 447–45.

